

# IMPLEMENTASI MANAJEMEN KURIKULUM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI SMP WIRASWASTA BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG

**Fadillah\*, Mardianto\*\*, Wahyudin Nur Nasution\*\*\***

\*Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Sumatera Utara

\*\*Dr., M.Pd Co Author Pascasarjana UIN Sumatera Utara

\*\*\*Dr., M.Ag Co Author Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

**Abstrak:** The purpose of this research are “Implementation Management Curriculum in gaining Teaching Learning Quality in SMP Wiraswasta Batang Kuis Deli Serdang. The aim of this research is to know about the curriculum management in gaining the teaching learning process through organizing, actuating, controlling and evaluating curriculum of SMP Wiraswasta Batang Kuis on Ampera Streath Batang Kuis, Deli Serdang, North Sumatera. This research is qualitative naturalistic style, by collecting and describing data naturally as it is in the field study. The research had found that curriculum management in gaining teaching learning process in SMP Wiraswasta Batang Kuis is made well by carrying out planning, organizing, controlling and evaluating. Through planning, The Principal made the programs. Those are Semester and Academic Year Programs, Sillylabus, Lesson Plans, Media needed for an Academic Year. While organizing, the school arranged curriculum which is relevant to the National Institution for Education standard and link to the local need. These programs were introduced and done by teachers and students well. Controlling and evaluating was done in order to get the program carried out well.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi manajemen kurikulum dalam meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran mulai dari proses perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum, pengawasan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Lembaga pendidikan yang diteliti adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wiraswasta Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif naturalistik, yakni melakukan pengambilan data serta dideskripsikan secara alami sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sesungguhnya dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi manajemen kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Wiraswasta Batang Kuis sudah berjalan cukup baik yang diawali dengan proses perencanaan kurikulum dan berlanjut dengan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Melalui perencanaan, kepala SMP Wiraswasta Batang Kuis bersama Tim Pengembangan Kurikulum menyusun program kurikulum mulai dari program semester, program tahunan, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, bahan pembelajaran serta media pembelajaran yang dibutuhkan selama satu tahun pelajaran. Sementara dalam pengorganisasian, pihak sekolah menyusun kurikulum yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Program-program tersebut selanjutnya diperkenalkan dan dilaksanakan oleh para guru dan siswa dengan baik. Agar program-program tersebut terlaksana dengan baik, maka dilakukan pengawasan dan evaluasi.

Kata Kunci: Manajemen Kurikulum, Kualitas Pembelajaran

## Pendahuluan

Proses pendidikan adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan ketika proses pemberdayaan menunjukkan hasilnya disitulah terlihat kualitas lembaga pendidikan. Penerapan manajemen merupakan faktor penting dalam pencapaian kualitas sekolah yang diharapkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain penyempurnaan kurikulum, pengadaan bahan ajar, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan manajemen pendidikan, serta pengadaan fasilitas pendidikan.

Pendidikan dan pembelajaran adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan karena dari keduanya pendidikan dilaksanakan, dikembangkan dan dijadikan dasar bagi upaya pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan Pembelajaran dipahami sebagai proses penciptaan lingkungan yang menjadikan seorang individu dapat melakukan aktifitas belajar yang dengan belajar itu akan dapat berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak baik menjadi baik, dari tidak terampil menjadi terampil.

Pendidikan adalah interaksi pribadi diantara para peserta didik dan interaksi antara guru dengan peserta didik. Kegiatan pendidikan adalah suatu proses yang tidak dapat terjadi tanpa interaksi antar pribadi. Belajar adalah proses pribadi, tetapi juga proses sosial yang terjadi ketika masing-masing individu berhubungan dengan yang lain serta membangun pengertian dan pengetahuan bersama<sup>1</sup>

Desentralisasi pendidikan menawarkan paradigma baru bagi kepala sekolah untuk lebih mandiri dalam mengembangkan seluruh potensi dan sumber daya sekolah untuk menjadi sekolah yang handal bahkan unggulan. Tuntutan tersebut diperkirakan berimplikasi dalam penyusunan kurikulum dan manajemen sekolah. Perubahan manajemen pendidikan menjadi suatu keniscayaan, sehingga sekolah-sekolah dituntut melakukan perubahan manajemen agar lulusan sekolah benar-benar menghasilkan siswa-siswi yang berkualitas.

Zainal Arifin menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia hingga saat ini terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pendidikan dengan berbagai pendekatan, baik melalui pendekatan kelembagaan, legal formal, maupun pemberdayaan sumber daya pendidikan. Pendekatan kelembagaan salah satunya melalui lahirnya Direktorat Jenderal Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendekatan legal formal melalui serangkaian peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, seperti Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Adapun pendekatan pemberdayaan sumber daya pendidikan diwujudkan dengan cara melakukan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan secara sistematis dan berkesinambungan.<sup>2</sup>

Pendidikan di era globalisasi saat ini yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya penyempurnaan sistem pendidikan, misalnya penyempurnaan pada manajemen pendidikan yang modern dan profesional dengan bemuansa pendidikan. Dalam hal ini lembaga-lembaga pendidikan diharapkan mampu mewujudkan peranannya secara efektif dengan keunggulan dalam kepemimpinan, staf, proses belajar mengajar, pengembangan staf, kurikulum, tujuan dan harapan, iklim sekolah, penilaian diri, komunikasi, dan keterlibatan orang tua/masyarakat.

Lahirnya otonomi daerah dalam bidang pendidikan yang secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 telah memberikan peluang yang besar bagi daerah dan lembaga pendidikan dalam mengelola dan menata penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi. Dalam hal ini, menurut Hamzah B Uno, bahwa guna menyesuaikan perubahan kebijakan tersebut, maka visi pendidikan hendaknya harus segera dibenahi. Pelaksanaan pendidikan yang selama ini banyak diwarnai dengan pendekatan sarwa negara (*state driven*); yakni yang berorientasi terjadinya sentralisasi

## **Fadillah:** Implementasi Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

pendidikan; harus bisa diorientasikan pada aspirasi masyarakat (*putting customers first*); yakni melalui sistem desentralisasi pendidikan. Pendidikan harus mengenali siapa pelanggannya, dan dari pengenalan ini pendidikan memahami apa aspirasi dan kebutuhan mereka, baru ditentukan sistem pendidikan, macam kurikulumnya, dan persyaratan pengajarnya.<sup>3</sup>

Adanya sistem desentralisasi pendidikan dianggap sebagai jalan yang terbaik guna menata pendidikan Indonesia di masa mendatang. Sebagai konsekuensi kebijakan ini, maka pelaksanaan konsep *school-based Management* (manajemen berbasis sekolah) dan *community-based education* (pendidikan berbasis masyarakat) merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam era otonomi daerah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai konsepsi dasar manajemen pendidikan masa kini merupakan konsep manajemen sekolah yang memberikan kewenangan dan kepercayaan yang luas bagi sekolah berdasarkan profesionalisme untuk menata organisasi sekolah. Adapun fungsi utamanya adalah mencari, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya pendidikan yang tersedia, serta memperbaiki kinerja sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekolah yang bersangkutan. Sebagian besar sekolah swasta sebenarnya telah melaksanakan konsepsi ini walaupun sebagian dari mereka masih perlu meningkatkan diri dalam upaya mencapai produktivitas sekolah yang diinginkan.

Konsep peningkatan kualitas pendidikan berbasis sekolah muncul dalam kerangka pendekatan manajemen berbasis sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) akan membawa kemajuan dalam dua area yang saling tergantung, yaitu, pertama, kemajuan program pendidikan dan pelayanan kepada siswa-orang tua, siswa dan masyarakat. Kedua, kualitas lingkungan kerja untuk semua anggota organisasi.<sup>4</sup>

Model Manajemen Berbasis Sekolah menempatkan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerapkan kebijakan, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang berdampak terhadap kinerja sekolah. Kinerja sekolah akan sangat ditentukan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah yang menyangkut pengembangan kurikulum. Namun demikian, dalam merumuskan kebijakan, sekolah tetap mengacu kepada kebijakan pusat serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.<sup>5</sup>

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Konsep Manajemen Berbasis Sekolah bahwa Kurikulum merupakan salah satu kewenangan yang didelegasikan kepada sekolah. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh sekolah untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di sekolah.

Pengelolaan kurikulum pada tingkat sekolah perlu dikoordinasi oleh pihak pimpinan lembaga dengan memberdayakan partisipasi para orangtua dan masyarakat. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dengan maksud agar dapat memahami, membantu, dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran, menilai kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum, baik kepada masyarakat maupun pada pemerintah.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wiraswasta Batang Kuis merupakan lembaga pendidikan yang dikembangkan sesuai konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. SMP Wiraswasta Batang Kuis yang saat ini dipimpin oleh Elfida SE terus melakukan pembenahan dan penataan guna memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Pembenahan dan penataan tersebut mencakup penyempurnaan sarana dan prasarana.

SMP Wiraswasta Batang Kuis sebagai salah satu satuan Pendidikan, melakukan penyusunan dan pengembangan kurikulum. Kurikulum SMP WIRASWASTA Batang Kuis disusun dengan berlandaskan kepada (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 kepada kepala sekolah bahwa kurikulum SMP Swasta Wiraswasta Batang Kuis tahun pelajaran 2017/2018 mengacu pada Kurikulum 2013 bagi kelas VII adapun kelas VIII dan IX masih menggunakan kurikulum 2006 KTSP. Adanya perbedaan kurikulum tersebut dikarenakan kurikulum 2013 baru diterapkan pada tahun ini, sehingga K13 tersebut diterapkan untuk kelas VII. Tidak diterapkannya kurikulum 2013 di kelas VIII dan IX dikarenakan pada awalnya peserta didik sudah menggunakan kurikulum KTSP sehingga untuk diterapkannya kurikulum 2013 kepada mereka akan menjadi tidak efektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, adalah penting permasalahan ini untuk diteliti sedemikian rupa sehingga nantinya ditemukan formula dan acuan yang baik dalam menata dan mengelola kurikulum, terutama kurikulum untuk tingkat SMP. Selain itu faktor kemudahan akses, komunikasi dan transportasi menuju SMP Wiraswasta karena SMP Wiraswasta berada di tengah kota Batang Kuis serta kedekatan secara emosional peneliti kepada SMP Wiraswasta sebab peneliti pernah mengabdikan diri di SMP Wiraswasta menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan di sekolah tersebut. Adapun judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah "Implementasi Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan kualitas Pembelajaran di SMP Wiraswasta Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang".

## Landasan Teori

### 1. Pengertian Manajemen Kurikulum

Istilah manajemen kurikulum berasal dari dua suku kata, yaitu manajemen dan kurikulum. Manajemen sendiri diartikan oleh para pakar secara beragam. Hasibuan mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>6</sup> Adapun Fachrudin mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi pekerjaan organisasi dan untuk menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas.<sup>7</sup>

Syafaruddin menyimpulkan bahwa manajemen berisikan adanya organisasi sebagai wadah formal, adanya manajer yang melakukan aktivitas manajemen, adanya anggota organisasi bisnis atau perusahaan dan organisasi jasa lainnya, serta fungsi-fungsi dan prosedur yang harus dijalankan sebagai ilmu yang bersumber dari pengalaman empiris selama ini dalam mengelola berbagai organisasi sehingga mencapai kemudahan dalam kehidupan yang serba kompleks untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>8</sup>

Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni dalam melakukan kerjasama dalam suatu organisasi melalui proses yang sistematis, terkoordinasi. Sama halnya seperti manajemen, maka kurikulum juga diartikan oleh pakar pendidikan secara beragam meskipun memiliki tujuan yang sama. Rusman, misalnya, menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>9</sup> Definisi yang hampir senada juga diungkapkan oleh Oemar Hamalik<sup>10</sup> dan beberapa pakar pendidikan Indonesia lainnya.

Kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk merancang dan mempengaruhi siswa agar dapat belajar secara kelompok atau mandiri, baik di lakukan dalam ruangan kelas maupun di luar sekolah. Kurikulum adalah suatu badan pengetahuan – materi dan /atau subjek pengetahuan itu sendiri. Pendidik dalam pengertian ini adalah proses dimana pengetahuan tersebut ditularkan atau 'disampaikan' kepada siswa dengan metode yang paling efektif yang dapat dibuat atau dirancang.

Rusman mendefinisikan manajemen kurikulum sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistemtik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.

## **Fadillah:** Implementasi Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).<sup>11</sup>

Definisi di atas secara jelas menggambarkan bahwa manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.

Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (standar kompetensi/kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada.<sup>12</sup>

Kurikulum Pada Tingkat Satuan Pendidikan dikemas sedemikian rupa hingga kurikulum itu menjadi tepat dan efisien dapat menampung aspirasi kebutuhan wilayah keberadaan sekolah itu dan lingkungan masyarakat sekitar merasa terpenuhi dengan keberadaan sekolah sebagai tempat pendidikan yang tepat juga tidak bertentangan dengan standar nasional.

### **2. Prinsip dan Fungsi Manajemen Kurikulum**

Dalam melaksanakan manajemen kurikulum, sedikitnya ada 5 (lima) prinsip<sup>13</sup> yang harus menjadi perhatian penting, yaitu:

- a) Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
- b) Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
- c) Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
- d) Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat.
- e) Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.

Selain prinsip-prinsip tersebut juga perlu dipertimbangkan kebijakan pemerintah, seperti kurikulum nasional, pedoman penyelenggaraan program, kebijaksanaan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, kebijaksanaan penerapan Kurikulum pada Tingkat Satuan Pendidikan, keputusan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang/jenis sekolah yang bersangkutan.

Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber maupun komponen kurikulum. Sehingga tak heran bila kurikulum ini memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum; pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
- b) Meningkatkan keadilan (*equity*) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal; kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integratis dalam mencapai tujuan kurikulum.
- c) Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik; kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan

dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.

- d) Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran; dengan pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar.
- e) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien, karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.
- f) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum; kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.

### 3. Implementasi Manajemen Kurikulum

Salah satu sasaran dari kebijakan desentralisasi pendidikan adalah kemandirian setiap satuan pendidikan, termasuk dalam implementasi serta pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, pemerintah hanya menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, sedangkan dalam pengembangannya diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Secara terperinci Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 38 Ayat (1) dan (2) menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervise dinas pendidikan Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah.<sup>15</sup>

Guna memenuhi amanat Undang-Undang tersebut, secara garis besar beberapa kegiatan berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen kurikulum perlu dirumuskan oleh satuan pendidikan, khususnya terhadap langkah-langkah pelaksanaan dan implementasi kurikulum tersebut. Di antara langkah-langkah pelaksanaan serta implementasi kurikulum yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan/sekolah adalah melalui empat tahap, yaitu a. Perencanaan, b. Pengorganisasian, c. implementasi dan d. evaluasi.<sup>16</sup>

#### a) Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar-belajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Tanpa perencanaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah pada tujuan yang diharapkan.<sup>17</sup>

Secara umum, dalam perencanaan kurikulum harus dipertimbangkan kebutuhan masyarakat, karakteristik pembelajar, dan lingkup pengetahuan menurut hierarki keilmuan. Siswa dengan karakteristik tersebut memiliki dua kemungkinan; meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau terjun ke dunia kerja serta masyarakat.

#### b) Pengorganisasian Kurikulum

Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif.<sup>18</sup> Pengorganisasian kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sehingga dalam hal ini, ada beberapa

faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian kurikulum, di antaranya:

- 1) Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran, dalam hal ini yang menjadi pertimbangan dalam penentuan materi pelajaran adalah adanya integrasi antara aspek masyarakat (yang mencakup nilai budaya dan sosial) dengan aspek siswa (yang mencakup minat, bakat dan kebutuhan). Dan dalam hal ini, bukan hanya materi pelajaran yang harus diperhatikan, tetapi bagaimana urutan bahan tersebut dapat disajikan secara sistematis dalam kurikulum.
  - 2) Kontinuitas kurikulum, dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian kurikulum adalah yang berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa, agar jangan samapi terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya.
  - 3) Keseimbangan bahan pelajaran, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian bahan pelajaran dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus terjadi. Oleh sebab itu dalam pengorganisasian kurikulum keseimbangan substansi isi kurikulum harus dilihat secara komprehensif untuk kepentingan siswa sebagai individu, tuntutan masyarakat, maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dalam penentuan bahan pelajaran, aspek estetika, intelektual, moral, sosial-emosional, personal, religius, seni-aspirasi dan kinestetik, semuanya harus terakomodasi dalam isi kurikulum.
  - 4) Alokasi waktu, dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah alokasi waktu yang dibutuhkan dalam kurikulum harus sesuai dengan jumlah materi yang disediakan. Maka untuk itu, penyusunan kalender pendidikan untuk mengetahui secara pasti jumlah jam tatap muka masing-masing pelajaran merupakan hal yang terpenting sebelum menetapkan bahan pelajaran.<sup>19</sup>
- c) Implementasi Kurikulum
- Implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Implementasi ini juga sekaligus merupakan penelitian lapangan untuk keperluan validasi sistem kurikulum itu sendiri<sup>20</sup>. Maka dalam hal ini, pembelajaran di dalam kelas merupakan tempat yang tepat untuk melaksanakan dan menguji validasi kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan, yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata.
- d) Evaluasi Kurikulum
- Yang dimaksud dengan evaluasi kurikulum ialah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi/data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran.<sup>21</sup> Evaluasi kurikulum tersebut dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan (*feasibility*) program. Dalam konteks pelaksanaan serta pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan, karena dengan evaluasi akan dapat ditentukan nilai dan arti dari suatu kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu diperhatikan atau tidak.<sup>22</sup>

## Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV yang seluruhnya telah membahas berbagai permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP Swasta Wiraswasta Batang

- Kuis dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan yang berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan tujuan dalam menjalankan proses pembelajaran. Adapun perencanaan kurikulum yang dilaksanakan tersebut mencakup beberapa kegiatan, yakni meliputi: (1) penyusunan kalender akademik; (2) pengaturan tugas dan kewajiban guru; (3) penyusunan jadwal pelajaran; (4) penyusunan tujuan dan isi kurikulum; dan (5) penyusunan program kegiatan sekolah.
2. Pengorganisasian kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP Swasta Wiraswasta Batang Kuis cenderung menggunakan pengorganisasian yang bersifat elektik, yakni suatu program kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran dan peserta didik. Artinya dalam melaksanakan kurikulum, SMP Swasta Wiraswasta Batang Kuis senantiasa menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, perbedaan perkembangan dan kecepatan masing-masing individu siswa sehingga dengan demikian diharapkan dapat mengakomodasikan kebutuhan serta potensi masing-masing siswa.
  3. Pelaksanaan kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP Swasta Wiraswasta Batang Kuis dapat dikatakan telah sesuai dengan yang diharapkan, hal ini terlihat dari terciptanya program belajar-mengajar yang kondusif dan efisien dengan selalu berorientasi pada kebutuhan siswa. Dalam melaksanakan program pembelajaran, guru-guru SMP Swasta Wiraswasta Batang Kuis selalu memperhatikan 3 aspek penting dalam melaksanakan proses belajar-mengajar, yaitu: pengelolaan KBM; pemilihan strategi pembelajaran; dan penentuan media dan sumber belajar. Ketiga aspek tersebut merupakan penentu keberhasilan pelaksanaan kurikulum sekolah sehingga dapat berimplikasi kepada mutu pendidikan yang sedang dilaksanakan yang tercermin pada hasil perkembangan peserta didik yang memuaskan dari waktu ke waktu.
  4. Pengawasan kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP Swasta Wiraswasta Batang Kuis dilaksanakan dengan dua cara, yaitu mengawasi langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Yayasan, kepala sekolah bersama Pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Melalui pengawasan tersebut kepala sekolah dan pengawas pendidikan langsung mendatangi ruangan kelas dan melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah pada waktu-waktu tertentu terhadap proses pembelajaran tanpa diketahui oleh para guru dan siswa. Sistem pengawasan yang berlaku di SMP Swasta Wiraswasta Batang Kuis dapat dikategorikan sebagai sebuah sistem pengawasan yang sangat sederhana dan kurang efektif. Sebab pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pendidikan biasanya bersifat musiman, sementara aktivitas pengawasan hendaknya dilakukan secara terus menerus. Begitu juga halnya dengan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh kepala sekolah secara diam-diam dinilai kurang efektif. Hal ini bisa berdampak buruk bagi pelaksanaan pengawasan tersebut, bahkan terkesan tidak objektif.
  5. Evaluasi kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP Swasta Wiraswasta Batang Kuis berfungsi untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang sedang dilaksanakan. Selain itu evaluasi kurikulum juga dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Adapun Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, serta kelayakan program. Sedangkan komponen kurikulum yang terpenting untuk dievaluasi pada SMP Swasta Wiraswasta Batang Kuis adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Dalam melaksanakan evaluasi kurikulum, SMP Swasta Wiraswasta Batang Kuis menetapkan 4 (empat) aspek utama yang terdiri dari: evaluasi terhadap tujuan pendidikan; evaluasi terhadap materi kurikulum; evaluasi terhadap strategi pembelajaran; dan evaluasi terhadap program penilaian.



(Endnotes)

- <sup>1</sup> Syaiful Ahyar Lubis, *Profesi Keguruan*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010), h. 112
- <sup>2</sup> Zainal Arifin, "Sambutan", dalam Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. x.
- <sup>3</sup> Hamzah B Uno, *Profesi Kependidikan: Problema Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), cet. II, h. 5.
- <sup>4</sup> Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), h.81.
- <sup>5</sup> Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 65.
- <sup>6</sup> Hasibuan S.P Melayu, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), cet. V, h. 2.
- <sup>7</sup> Fachruddin, *Manajemen Pemberdayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, dalam Mardianto (Ed), *Adminstrasi Pendidikan: Menata Pendidikan untuk Kependidikan Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 36.
- <sup>8</sup> Syafaruddin, *Managemen organisasi Pendidikan, Persfektif sain dan Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 36.
- <sup>9</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 3.
- <sup>10</sup> Lihat Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 18.
- <sup>11</sup> Rusman, *Manajemen*, h. 3.
- <sup>12</sup> Rusman, *Manajemen*, h. 4.
- <sup>13</sup> Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran*, h. 128.
- <sup>14</sup> Lihat: Asep Sudarsyah dan Diding Nurdin, *Manajemen Implementasi Kurikulum, dalam Tim Dosen Adminstrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 192-193.
- <sup>15</sup> Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 20.
- <sup>16</sup> Asep Sudarsyah dan Diding Nurdin, *Manajemen Implementasi Kurikulum, dalam Tim Dosen Adiminstrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 196.
- <sup>17</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), cet. III, h. 171.
- <sup>18</sup> Rusman, *Manajemen*, h. 60.
- <sup>19</sup> *Ibid*, h. 60 – 61.
- <sup>20</sup> Oemar Hamalik, *Dasa-Dasar*, h. 238.
- <sup>21</sup> Rusman, *Manajemen*, h. 91.
- <sup>22</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum*, h. 342.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Zainal, "Sambutan", dalam Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Fattah, Nanang, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Fachruddin, *Manajemen Pemberdayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, dalam Mardianto (Ed), *Adminstrasi Pendidikan: Menata Pendidikan untuk Kependidikan Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010)
- Hamalik, Oemar, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- , *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), cet. III
- Lubis, Syaiful Ahyar, *Profesi Keguruan*, (Medam: Perdana Mulya Sarana, 2010)
- Melayu, Hasibuan S.P, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), cet. V
- Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003)
- Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Syafaruddin, *Managemen organisasi Pendidikan, Persfektif sain dan Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2015)
- Sudarsyah, Asep, dan Diding Nurdin, *Manajemen Implementasi Kurikulum, dalam Tim Dosen Adminstrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Uno, Hamzah B, *Profesi Kependidikan: Problema Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), cet. II
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Bandung: Citra Umbara, 2010)

